

Model Collaborative Governance dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia: Systematic Literature Review Provinsi Sulawesi Barat

Muhammad Ishak N¹, Rahayu², Muhammad Irvan Nur'Iva³, Herman⁴

¹Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Makassar
Email: ishaknaja46@gmail.com

²Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Sastra,
Universitas Negeri Makassar
Email: rahayu@unm.ac.id

³ Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Makassar
Email: muh.irvan.nuriva@unm.ac.id

⁴ Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Makassar
Email: hermandody@unm.ac.id

ABSTRACT

Waste management issues constitute a strategic agenda that requires a collaborative governance approach considering the number of actors involved, limited government capacity, and the importance of community engagement. This study aims to synthesize various collaborative governance models in the implementation of waste management policies in Indonesia and examine their relevance to strengthening waste governance systems in West Sulawesi Province. The research employs a Systematic Literature Review (SLR) method based on the PRISMA protocol on scientific publications from 2010–2026 collected from reputable databases. The selection process resulted in 15 articles that met the inclusion criteria and were analyzed thematically. The findings show that the most widely applied collaboration patterns include Collaborative Governance, Public–Private Partnership (PPP), and Penta-Helix Collaboration. The implementation of these models contributes to improving waste service quality, expanding public participation, increasing funding efficiency, and fostering community-based innovation. Additionally, the government's role has shifted from a dominant actor to a facilitator and coordinator of cross-stakeholder collaboration. However, collaborative practices still face challenges such as weak institutional coordination, limited resources, sectoral ego, and suboptimal public participation. In the context of West Sulawesi, several governance issues highlight the importance of adopting a more integrated and adaptive collaborative model. Therefore, this study recommends strengthening collaborative regulations, establishing multi-

stakeholder forums, optimizing public–private partnerships, empowering communities, and utilizing digital technology as sustainable policy strategies.

Keywords: *collaborative governance, public policy, waste management, multi-stakeholder partnership, systematic literature review,*

ABSTRAK

Permasalahan persampahan merupakan agenda strategis yang memerlukan pendekatan tata kelola kolaboratif mengingat banyaknya aktor yang terlibat, keterbatasan kapasitas pemerintah, serta pentingnya pelibatan masyarakat. Studi ini bertujuan menyintesis berbagai model *collaborative governance* dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia sekaligus menelaah keterkaitannya dengan penguatan sistem tata kelola persampahan di Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian dilaksanakan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada protokol PRISMA terhadap publikasi ilmiah periode 2010–2026 yang dihimpun dari sejumlah basis data bereputasi. Tahap seleksi literatur menghasilkan 15 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan selanjutnya dianalisis secara tematik. Hasil sintesis memperlihatkan bahwa pola kolaborasi yang paling banyak diterapkan meliputi *Collaborative Governance, Public–Private Partnership (PPP)*, serta *Penta-Helix Collaboration*. Implementasi berbagai model tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan persampahan, perluasan partisipasi publik, efisiensi pendanaan, serta tumbuhnya inovasi berbasis komunitas. Selain itu, terjadi perubahan peran pemerintah dari aktor yang dominan menjadi fasilitator sekaligus koordinator kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Meskipun demikian, praktik kolaborasi masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya, ego sektoral, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Dalam konteks Sulawesi Barat, sejumlah persoalan tata kelola persampahan menegaskan pentingnya penerapan model kolaboratif yang lebih terpadu dan adaptif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi kolaboratif, pembentukan forum multipihak, optimalisasi kemitraan pemerintah–swasta, pemberdayaan komunitas, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai strategi kebijakan berkelanjutan.

Kata kunci: *collaborative governance, kebijakan publik, pengelolaan sampah, kemitraan multipihak, systematic literature review*

1. PENDAHULUAN

Isu pengelolaan sampah menjadi perhatian utama dalam tata kelola lingkungan di Indonesia dan menunjukkan tren peningkatan sejalan dengan

pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Kompleksitas persoalan persampahan tidak semata berkaitan dengan aspek teknis operasional, tetapi juga menyangkut dimensi kebijakan, koordinasi kelembagaan, partisipasi warga, serta kontribusi sektor swasta Arumsari, N., et al. (2025). Pada situasi tersebut, pendekatan *collaborative governance* dipandang semakin relevan sebagai strategi untuk mengatasi keterbatasan kapasitas pemerintah sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan.

Berbagai hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis kolaborasi di sejumlah daerah di Indonesia melibatkan tiga aktor sentral, yakni pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat/komunitas Zarkasih, C., et al. (2025). Pemerintah daerah menjalankan fungsi regulator sekaligus penghubung kerja sama. Pihak swasta memberikan kontribusi melalui investasi dan dukungan teknis operasional. Di sisi lain, masyarakat berperan aktif dalam pengurangan sampah dari sumber melalui kegiatan komunitas dan pengelolaan bank sampah.

Bentuk kolaborasi tersebut terwujud melalui kemitraan layanan publik, dialog multipihak, skema *public-private partnership* (PPP), dan model inovatif seperti *penta-helix*.

Walaupun demikian, efektivitas *collaborative governance* masih dihadapkan pada berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural maupun kultural (Emerson et al, 2012). Kendala yang sering muncul mencakup ego sektoral antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta rendahnya pelibatan Masyarakat (Bryson et al, 2006); (Ansell & Gash, 2008). Berdasarkan hasil penelitian bahwa kolaborasi yang terjalin kerap bersifat simbolik dan belum sepenuhnya menghasilkan proses *co-creation* yang substantif di antara para pemangku kepentingan (Torfing et al, 2019). Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kepemimpinan fasilitatif, kejelasan pembagian peran, serta konsistensi dukungan kebijakan.

Kondisi serupa juga terlihat di kawasan Indonesia timur, termasuk Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah di beberapa wilayah perkotaan di Sulawesi Barat menunjukkan volume yang cukup signifikan. Kabupaten Mamuju menghasilkan sekitar 84,6 ton sampah per hari, Kabupaten Polewali Mandar sekitar 129,4 ton per hari, dan Kabupaten Majene sekitar 52,1 ton per hari (KLHK, 2024). Meningkatnya timbulan sampah tersebut sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi perkotaan. Namun, kapasitas pengelolaan persampahan masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti belum memadainya sarana pengangkutan, terbatasnya fasilitas pengolahan, serta dominannya pendekatan *collect-transport-dispose* (*kumpul-angkut-*

buang). Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Sulawesi Barat belum sepenuhnya menerapkan prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan yang menekankan pengurangan, pemilahan, dan pengolahan dari sumber (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008).

Berdasarkan perspektif tata kelola, koordinasi antar perangkat daerah belum berjalan optimal, keterlibatan swasta masih terbatas, dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber relatif rendah. Program berbasis komunitas seperti bank sampah belum berkembang merata, sementara dukungan pendanaan serta inovasi teknologi masih minim. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah di Sulawesi Barat masih cenderung bersifat birokratis dan terpusat pada pemerintah daerah sehingga potensi kolaborasi multipihak belum dimanfaatkan secara maksimal.

Padahal, pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* mampu meningkatkan kinerja layanan persampahan, mendorong partisipasi warga, serta menciptakan efisiensi pembiayaan melalui kemitraan pemerintah–swasta. Kolaborasi multipihak juga mendorong lahirnya inovasi lokal sekaligus memperkuat kelembagaan lingkungan di tingkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan kajian sistematis untuk merangkum dan mensintesis berbagai model *collaborative governance* yang telah diterapkan di Indonesia sebagai bahan pembelajaran kebijakan (*policy learning*) bagi pengelolaan sampah di Sulawesi Barat. Pendekatan Systematic Literature Review (SLR) digunakan guna mengidentifikasi pola kolaborasi, faktor pendukung dan penghambat, serta model tata kelola yang paling sesuai bagi daerah berkembang. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan landasan konseptual sekaligus rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah Sulawesi Barat dalam memperkuat tata kelola persampahan berbasis kolaborasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan ilmiah terkait penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Proses penelusuran literatur mengikuti pedoman PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) untuk memastikan alur seleksi referensi berlangsung terstruktur, terbuka, dan konsisten.

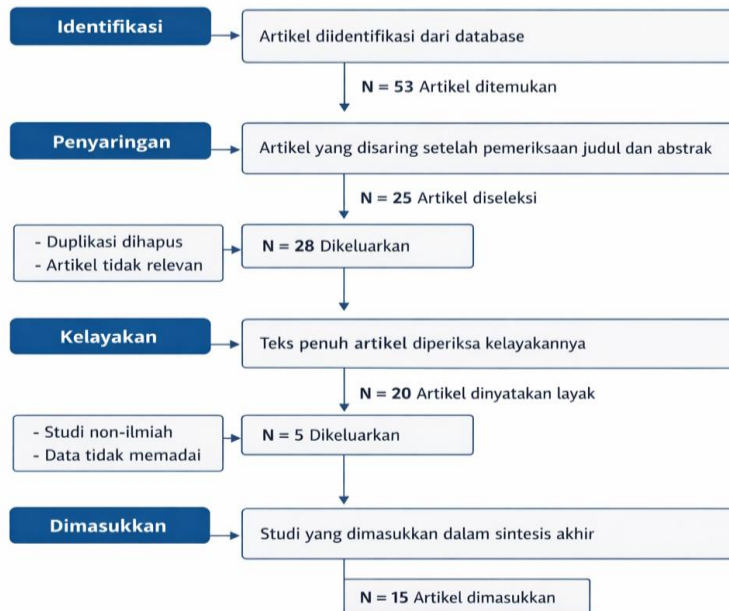
Sumber Data dan Strategi Pencarian

Penelusuran literatur dilakukan melalui berbagai basis data ilmiah, yaitu Scopus, Semantic Scholar, Google Scholar, PubMed. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi: “*collaborative governance*” OR “tata kelola kolaboratif” AND “*waste management*” OR “pengelolaan sampah” AND “Indonesia” dengan menggunakan **Kriteria inklusi:** Artikel ilmiah terbit pada rentang 2010–2026, Membahas *collaborative governance* dalam konteks pengelolaan sampah,

Penelitian dilakukan di Indonesia, Artikel terindeks dan melalui proses *peer-review*. Sedangkan kriteria eksklusi yaitu artikel non ilmiah atau berbentuk opini, Publikasi ganda dan Studi yang tidak berkaitan dengan kebijakan publik persampahan

Proses Seleksi Literatur

Sebanyak 53 artikel teridentifikasi pada tahap awal penelusuran. Setelah proses penyaringan judul dan abstrak, diperoleh 25 artikel yang relevan untuk ditelaah lebih lanjut. Tahap penilaian kelayakan teks penuh menghasilkan 20 artikel yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya, 5 artikel dikeluarkan karena keterbatasan data serta ketidaksesuaian fokus kajian. Dengan demikian, total 15 artikel dimasukkan dalam sintesis akhir. Berikut alur pengelolaan pemilihan artikel.



Gambar 1. Diagram Alir PRISMA Sumber: Data diolah Penulis (2026)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan 15 artikel dipilih maka penyajiannya dalam analisis Deskriptif Artikel. Hasil pemilihan artikel dengan menggunakan diagram alir PRISMA

menemukan 15 artikel yang dapat dilihat pada table 1 di bawah ini sebagai berikut.

Tabel 1. Ringkasan Karakteristik Studi yang Dianalisis

No	Nama Penulis, Tahun & Judul	Tujuan Penelitian	Metode & Sampel	Hasil	Temuan Utama	Kesimpulan
1	Agung Daniel Situmoran, 2025 <i>Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru</i>	Menganalisis collaborative governance serta faktor pendukung & penghambat pengelolaan sampah	Kualitatif deskriptif; wawancara, observasi, dokumentasi; pemda, swasta, masyarakat	Kolaborasi berjalan sesuai model Ansell & Gash namun terkendala sarana prasarana	Sinergi multipihak terbentuk tetapi kapasitas operasional terbatas	Kolaborasi efektif namun perlu penguatan SDM, infrastruktur & insentif lintas sektor
2	Andi Toappo Sawa Rifqi Hasan, 2025 <i>Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah DLH Kota Makassar</i>	Menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengelolaan sampah perkotaan	Kualitatif deskriptif; 11 informan; wawancara & observasi	Tata kelola kolaboratif berjalan namun belum optimal	Proses kolaboratif & desain kelembagaan baik; trust building lemah	Kolaborasi perlu penguatan kepercayaan & sinergi antar aktor
3	Cecep Zarkasih et al., 2025 <i>Collaborative Governance Pengelolaan Sampah Cilamaya Wetan</i>	Menganalisis kolaborasi multipihak pengelolaan sampah tingkat kecamatan	Kualitatif studi kasus; pemda, masyarakat, stakeholder lokal	Kolaborasi sudah ada namun belum optimal	Hambatan utama: anggaran, koordinasi, partisipasi publik rendah	Penguatan partisipasi masyarakat & kejelasan peran aktor krusial
4	Suhendra Prabowo et al., 2025 <i>Collaborative Governance Pengelolaan Sampah Pasar Kota Bandung</i>	Menganalisis tata kelola kolaboratif pengelolaan sampah pasar tradisional	Kualitatif deskriptif; pemda, swasta, pengelola pasar, komunitas	Proses kolaborasi mulai terbentuk; pemerintah fasilitator	Kendala pada trust, komitmen sumber daya & kesepahaman	Kolaborasi efektif perlu komunikasi berkelanjutan & pemberdayaan komunitas
5	Windriyani M. Senaen et al., 2025 <i>PPP TPPAS Nambo sebagai Model Kolaborasi Regional</i>	Mengkaji PPP sebagai model kolaboratif pengelolaan sampah regional	Systematic literature review; analisis kebijakan & proyek	PPP meningkatkan kapasitas pengolahan sampah regional	Tantangan finansial & kesiapan operasional proyek	Adaptasi model PPP penting untuk efisiensi & keberlanjutan
6	A. Nabilla et al., 2025 <i>Hambatan & Strategi Implementasi Kebijakan Persampahan Nasional</i>	Memetakan hambatan & strategi implementasi kebijakan pengelolaan sampah	Systematic literature review; artikel 2015–2025	Hambatan: tata kelola, teknis, sosial	Strategi: sinkronisasi regulasi, koordinasi lintas sektor, pemberdayaan komunitas	Kolaborasi konsisten turunkan residu & dukung target SDGs
7	M. H. M. Zein et al., 2024 <i>Collaborative Governance Pengelolaan Sampah Kota Ambon</i>	Mengevaluasi tata kelola kolaboratif pengelolaan sampah daerah	Kualitatif deskriptif; pemda, KSM, masyarakat	Kolaborasi signifikan tapi terkendala SDM & fasilitas	Peran KSM & bank sampah tingkatkan partisipasi warga	Komitmen & transparansi penting untuk keberlanjutan kolaborasi

*Model Collaborative Governance dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia:
Systematic Literature Review Provinsi Sulawesi Barat*

8	Sabarna & Ramdani, 2025 <i>Collaborative Governance Program “Mbah Dirjo” Yogyakarta</i>	Menganalisis faktor pendorong keberhasilan kolaborasi program reduksi sampah	Kualitatif; wawancara & observasi partisipatif	Kepemimpinan kuat dorong sinergi multipihak	Insentif & koordinasi efektif tingkatkan reduksi sampah	Sinergi stakeholder kunci keberhasilan pengelolaan sampah perkotaan
9	Muhammad Fadhlun, 2025 <i>Collaborative Governance in Indonesian Waste Management: A Systematic Literature Review</i>	Mensintesis literatur collaborative governance pengelolaan sampah Indonesia	Systematic literature review	Kolaborasi luas namun efektivitas terbatas	Hambatan: relasi kuasa timpang, institusi terfragmentasi, partisipasi lemah	Perlu co-creation nyata & kepemimpinan fasilitatif
10	Azka Fadhillah Khairunnisa (—) <i>Pendekatan Collaborative Governance Pengelolaan Sampah Kota Bengkulu</i>	Menganalisis kolaborasi pmda-swasta-masyarakat dalam pengelolaan sampah	Kualitatif deskriptif; wawancara & observasi	Kolaborasi berjalan baik namun terkendala sarpras & anggaran	Kurang armada angkut & kesadaran publik rendah	Upaya bersama cukup efektif atasi hambatan
11	Novita Arumsari et al., 2025 <i>Pentahelix Collaboration dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan</i>	Mengkaji kontribusi lima aktor pentahelix dalam pengelolaan sampah	Mini review literatur	Aktor pentahelix berperan komplementer	Tantangan: kesadaran publik, sumber daya, koordinasi	Pentahelix solusi komprehensif pengelolaan sampah berkelanjutan
12	Trio Saputra et al., 2025 <i>Dynamics of Collaborative Governance in Indonesian Sustainable Waste Management</i>	Mengeksplorasi perubahan model collaborative governance berkelanjutan	Studi kasus kualitatif; wawancara & dokumen	Model baru lebih inklusif & adaptif	Peran pmda bergeser jadi fasilitator & koordinator platform	Reformasi tata kelola kolaboratif tingkatkan keberlanjutan
13	Nurimna Fadliah et al., 2021 <i>Implementasi Kebijakan Persampahan Berbasis Collaborative Governance di Makassar</i>	Mendeskripsikan implementasi kebijakan persampahan kolaboratif	Kualitatif; informan; wawancara & observasi	5 Implementasi kolaboratif terlaksana baik	Komitmen antar lembaga & respon positif bank sampah	Komunikasi & dukungan sumber daya faktor kunci keberhasilan
14	Abd. Rahman P., 2025 <i>Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Polewali Mandar</i>	Mengevaluasi implementasi kebijakan persampahan daerah	Studi literatur kebijakan; model implementasi & collaborative governance	Kebijakan jelas namun implementasi belum optimal	Kendala: distribusi sumber daya, komunikasi, partisipasi	Perlu tata kelola kolaboratif & adaptif serta evaluasi partisipatif
15	Fatmawati et al., 2022 <i>Waste Bank Policy Implementation through</i>	Menganalisis implementasi kebijakan bank sampah berbasis kolaborasi	Kualitatif eksploratif studi kasus; Makassar & Bantaeng	Implementasi belum optimal terutama komunikasi & partisipasi	Kolaborasi stakeholder penting tingkatkan efektivitas program	Kolaborasi intensif tingkatkan partisipasi publik & swasta

	Collaborative Approach					
--	------------------------	--	--	--	--	--

Sumber: Hasil sintesis penulis (2026)

Hasil *Systematic Literature Review* terhadap 15 artikel terpilih menunjukkan bahwa kajian mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Indonesia didominasi oleh pendekatan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus pada level pemerintah daerah. Sebagian besar penelitian berfokus pada analisis implementasi tata kelola kolaboratif dalam konteks perkotaan maupun daerah berkembang, seperti Pekanbaru, Makassar, Cilamaya Wetan, Bandung, Ambon, Yogyakarta, Bengkulu, hingga Polewali Mandar. Selain itu, beberapa studi menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* dan *mini review* untuk memetakan perkembangan konseptual tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian akademik terhadap *collaborative governance* dalam sektor persampahan terus meningkat, seiring dengan kebutuhan akan model tata kelola yang lebih adaptif dan partisipatif dalam menghadapi kompleksitas persoalan persampahan .

Berdasarkan sintesis literatur, model *collaborative governance* yang paling dominan digunakan dalam pengelolaan sampah di Indonesia adalah model yang merujuk pada kerangka Ansell dan Gash, yang menekankan pentingnya dialog antar aktor, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan kepemimpinan fasilitatif. Model ini tampak pada studi Situmoran (2025), Hasan (2025), Zarkasih et al. (2025), Prabowo et al. (2025), Zein et al. (2024), Fadliah et al. (2021), serta Fatmawati et al. (2022), yang secara umum menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai koordinator utama dalam membangun interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Namun, efektivitas implementasi model ini belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada kendala struktural maupun sosial, seperti lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kepercayaan antar pemangku kepentingan.

Selain model *collaborative governance* konvensional, beberapa penelitian menunjukkan perkembangan pendekatan kolaboratif yang lebih variatif. Studi Senaen et al. (2025) menyoroti penerapan skema *Public-Private Partnership* (PPP) sebagai model kolaborasi yang efektif dalam mendukung pengelolaan sampah skala regional, khususnya melalui penyediaan infrastruktur dan dukungan teknologi. Sementara itu, Arumsari et al. (2025) menunjukkan bahwa pendekatan *penta-helix* menawarkan model tata kelola yang lebih komprehensif dengan melibatkan lima unsur utama, yaitu pemerintah, akademisi, sektor bisnis, komunitas, dan media. Temuan ini diperkuat oleh Saputra et al. (2025)

yang menunjukkan adanya transformasi model tata kelola menuju pendekatan yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis platform multipihak. Dengan demikian, literatur menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah tidak bersifat tunggal, tetapi berkembang sesuai konteks kelembagaan dan kebutuhan daerah.



Gambar 2: Pengelolaan Sampah Kalaboratif

Dari aspek aktor yang terlibat, seluruh penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pengelolaan sampah secara konsisten melibatkan tiga kelompok utama, yakni pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah daerah berperan sebagai regulator, koordinator kebijakan, sekaligus penghubung antar aktor. Sektor swasta umumnya berkontribusi melalui penyediaan investasi, teknologi, maupun dukungan pembiayaan, terutama dalam konteks pengelolaan infrastruktur persampahan. Sementara itu, masyarakat dan komunitas berperan dalam pengurangan sampah dari sumber melalui partisipasi aktif, pengelolaan bank sampah, dan perubahan perilaku lingkungan. Pada beberapa studi, keterlibatan kelompok masyarakat terbukti menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program pengelolaan sampah, khususnya di tingkat lokal.

Transformasi Peran Pemerintah

Hasil literatur penelitian ini juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam peran pemerintah daerah. Jika dalam pendekatan birokratis tradisional pemerintah bertindak sebagai aktor dominan yang mengendalikan seluruh proses layanan persampahan, maka dalam pendekatan *collaborative governance* pemerintah mulai bertransformasi menjadi fasilitator kolaborasi dan koordinator jejaring multipihak. Transformasi ini terlihat dalam studi Prabowo et al. (2025), Saputra et al. (2025), dan Hasan (2025), yang menunjukkan bahwa

pemerintah tidak lagi hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga membangun ruang komunikasi, mediasi kepentingan, dan penguatan sinergi antar aktor. Pergeseran ini mencerminkan perubahan dari model *government* menuju *governance* yang lebih partisipatif.

Transformasi Peran Pemerintah
dalam Tata Kelola Sampah Kolaboratif



Gambar 3: Transformasi Peran Pemerintah Daerah dalam Penegelolaan Sampah

Terkait faktor pendukung, hasil sintesis menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *collaborative governance* sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan fasilitatif, komunikasi yang efektif, kepercayaan antar pemangku kepentingan, dukungan kebijakan formal, serta partisipasi aktif masyarakat. Studi Sabarna dan Ramdani (2025) menegaskan bahwa kepemimpinan yang kuat dan koordinasi yang efektif mampu mendorong keberhasilan reduksi sampah melalui kolaborasi multipihak. Demikian pula, Fadliah et al. (2021) menunjukkan bahwa komitmen antar lembaga dan dukungan sumber daya menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan persampahan berbasis kolaboratif. Selain itu, model berbasis komunitas seperti bank sampah terbukti mampu meningkatkan partisipasi publik secara nyata.

Di sisi lain, hambatan implementasi *collaborative governance* juga muncul secara konsisten dalam hampir seluruh studi. Kendala utama yang ditemukan meliputi ego sektoral antar lembaga, keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi kelembagaan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya komunikasi antar aktor. Beberapa penelitian juga menyoroti persoalan ketimpangan relasi kuasa, fragmentasi kelembagaan, dan risiko tata kelola kontraktual dalam skema PPP. Temuan Fadhlhan (2025) secara khusus menunjukkan bahwa banyak praktik kolaborasi

masih belum mencapai tingkat *co-creation* yang substantif dan cenderung bersifat administratif atau simbolik.

Dari sisi outcome, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* memberikan dampak positif terhadap peningkatan efektivitas layanan pengelolaan sampah, penguatan partisipasi masyarakat, efisiensi pembiayaan, dan pengembangan inovasi tata kelola lingkungan. Namun demikian, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, kualitas interaksi antar aktor, dan keberlanjutan komitmen kolaboratif. Dengan kata lain, keberadaan kolaborasi saja tidak secara otomatis menjamin efektivitas kebijakan apabila tidak didukung oleh mekanisme koordinasi yang kuat.

Dalam konteks Provinsi Sulawesi Barat, hasil sintesis ini memiliki relevansi yang sangat kuat. Kehadiran studi Abd. Rahman (2025) pada Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa tantangan utama pengelolaan sampah di daerah ini berkaitan dengan keterbatasan distribusi sumber daya, lemahnya komunikasi kelembagaan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan dari berbagai daerah lain di Indonesia, yang menunjukkan bahwa persoalan persampahan bukan semata persoalan teknis, tetapi persoalan tata kelola. Oleh karena itu, penerapan model *collaborative governance* yang menekankan penguatan dialog multipihak, pembagian peran yang jelas, kemitraan pemerintah-swasta, serta pemberdayaan masyarakat menjadi pendekatan yang relevan untuk dikembangkan di Sulawesi Barat.

Meningkatkan Pengelolaan Sampah Melalui Tata Kelola Kolaboratif



Gambar 4: Model Konseptual Tata Kelola Kolaboratif Sampah

Relevansi dan Rekomendasi Kebijakan untuk Provinsi Sulawesi Barat

Hasil *Systematic Literature Review* menunjukkan bahwa *collaborative governance* merupakan pendekatan yang relevan dan strategis dalam pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya dalam menjawab keterbatasan kapasitas

pemerintah daerah dalam aspek pendanaan, infrastruktur, sumber daya manusia, dan koordinasi kelembagaan. Sintesis literatur memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah berbasis kolaboratif sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif multiaktor, terutama pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat, serta dalam beberapa konteks diperluas melalui pendekatan *penta-helix* yang melibatkan akademisi dan media. Model kolaborasi yang paling dominan adalah *Collaborative Governance* berbasis Ansell dan Gash, meskipun beberapa studi juga menunjukkan efektivitas pendekatan *Public-Private Partnership* (PPP) dan model kolaborasi hibrida yang lebih adaptif. Namun demikian, efektivitas implementasi *collaborative governance* masih menghadapi berbagai hambatan, seperti ego sektoral antar lembaga, lemahnya koordinasi, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya kepercayaan dan komitmen antar pemangku kepentingan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aktor yang terlibat, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, kepemimpinan fasilitatif, kejelasan pembagian peran, serta dukungan regulasi yang memadai.

Dalam konteks Provinsi Sulawesi Barat, hasil kajian menegaskan bahwa pengelolaan sampah masih menghadapi tantangan kelembagaan dan operasional yang serupa dengan berbagai daerah lain di Indonesia, sehingga pendekatan *collaborative governance* memiliki relevansi yang tinggi untuk diadaptasi. Penguatan regulasi berbasis kolaborasi, pembentukan forum multipihak, pengembangan skema PPP, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan model kolaborasi yang kontekstual menjadi langkah strategis yang dapat mendukung transformasi tata kelola persampahan daerah. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi tata kelola kolaboratif secara sistematis berpotensi meningkatkan efektivitas layanan persampahan, memperluas partisipasi publik, mendorong inovasi kebijakan, dan memperkuat pembangunan lingkungan berkelanjutan di Sulawesi Barat.

KESIMPULAN

Hasil *Systematic Literature Review* menunjukkan bahwa *collaborative governance* telah menjadi pendekatan yang banyak digunakan dalam pengelolaan sampah di Indonesia melalui keterlibatan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Berbagai studi menunjukkan bahwa pendekatan ini berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas layanan persampahan, partisipasi masyarakat, serta pengembangan inovasi pembiayaan dan tata kelola melalui skema *PPP* maupun *penta-helix*. Namun, kajian yang ada masih didominasi studi kasus pada wilayah perkotaan dengan kapasitas kelembagaan yang relatif lebih baik, sementara konteks daerah berkembang, khususnya di kawasan Indonesia timur, masih belum banyak dikaji. Selain itu, hambatan seperti lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, ego sektoral, dan rendahnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa implementasi kolaborasi belum sepenuhnya optimal. Dalam konteks Sulawesi Barat, temuan ini menegaskan perlunya model *collaborative governance* yang lebih adaptif dan kontekstual sebagai dasar penguatan kebijakan pengelolaan sampah, sehingga penelitian ini berkontribusi dalam menjembatani kesenjangan antara praktik kolaborasi yang telah berkembang secara nasional dengan kebutuhan tata kelola persampahan di daerah berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arumsari, N., Kusumawati, R., & Prasetyo, A. (2025). Pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis *pentahelix collaboration*: A mini review. *Jurnal Ilmu Lingkungan dan Kebijakan Publik*, 9(1), 33–45.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The design and implementation of cross-sector collaborations: Propositions from the literature. *Public Administration Review*, 66(Supplement 1), 44–55. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x>
- Dahlan, M., Al Yakin, A., & Pajammari, J. (2024). Analisis kebijakan pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 88–102.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fadhlan, M. (2025). Collaborative governance in Indonesian sustainable waste management: A systematic literature review. *Journal of Environmental Policy and Governance*, 7(1), 15–29.
- Fadhiah, N., Rahman, S., & Yusuf, M. (2021). Implementasi kebijakan persampahan berbasis *collaborative governance* di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Negara*, 27(3), 201–216.
- Fatmawati, A., Amiruddin, A., & Hidayat, R. (2022). Waste bank policy implementation through collaborative approach: Comparative study of Makassar and Bantaeng, Indonesia. *Sustainability*, 14(13), Article 7974. <https://doi.org/10.3390/su14137974>
- Hasan, A. T. S. R. (2025). *Collaborative governance dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar* (Skripsi). Universitas Hasanuddin.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2024). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*. <https://sipsn.menlhk.go.id>
- Khairunnisa, A. F. (2025). *Pendekatan collaborative governance dalam pengelolaan sampah Kota Bengkulu* (Skripsi). Universitas Bengkulu.
- Nabilla, A., Putri, D., & Ramadhan, F. (2025). Hambatan dan strategi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia: A systematic review. *Jurnal Kebijakan Lingkungan Indonesia*, 8(1), 41–58.
- Prabowo, S., Nugraha, D., & Kurniawan, T. (2025). Collaborative governance dalam pengelolaan sampah pasar tradisional di Kota Bandung. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 122–138.

- Rahman, A. (2025). *Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Polewali Mandar: Kajian atas tiga model implementasi kebijakan* (Tesis). Universitas Hasanuddin.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*.
- Sabarna, M. A. N., & Ramdani, R. (2025). Collaborative governance dalam program reduksi sampah “Mbah Dirjo” di Yogyakarta. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 67–81.
- Saputra, T., Hidayat, M., & Santoso, R. (2025). Dynamics of collaborative governance in Indonesian sustainable waste management. *International Journal of Sustainable Governance*, 6(1), 1–18.
- Senaen, W. M., Prakoso, H., & Wibowo, A. (2025). *Public–private partnership dalam pengelolaan sampah regional: Studi TPPAS Nambo*. *Jurnal Infrastruktur dan Kebijakan Publik*, 9(2), 95–110.
- Situmorang, A. D. (2025). *Collaborative governance dalam pengelolaan sampah Kota Pekanbaru* (Skripsi). Universitas Riau.
- Torfin, J., Sørensen, E., & Røiseland, A. (2019). Transforming the public sector into an arena for co-creation: Barriers, drivers, benefits, and ways forward. *Administration & Society*, 51(5), 795–825. <https://doi.org/10.1177/0095399716680057>
- Zarkasih, C., Nurhayati, E., & Hermawan, A. (2025). Collaborative governance dalam pengelolaan sampah: Studi kasus di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 6(2), 145–158.